

## MEMBUMIKAN MORAL BERPOLITIK NABI MUHAMMAD DI ERA 4.0

**Cut Zaenab**

*Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, Indonesia*

*Contributor Email: cutzaenab@gmail.com*

### **Abstract**

*Prophet Muhammad is a role model that Allah gave to mankind. Rasulullah teaches human everything that is in accordance with the Qur'an and hadith; included in politic. The politic taught by the Prophet Muhammad had been exemplified by him in its application when the Prophet Muhammad led Mecca and Medina. Rasulullah forming a country could not be separated from the support of the Arab community at that time. Rasulullah also applied correct moral and ethic in politic. However, we find in this 4.0 industrial revolution that everything becomes sophisticated and fast, the officials forget that moral. The leaders are too addicted to power and insane from office, so that they make politics as a bridge to pleasure without seeing the people in distress. Politics taught by the Prophet has been eroded more and more. Liberal official even provide separation on religion and politic. Religious matters are left to be the business of the Ulama and the state should be left to the business of politicians. Basically we already know that religion and state are of course inseparable. Religion must be upheld in politics and as a state; in order to create peace and peace as expected by the whole community.*

**Keywords:** *Moral, Politic, Prophet Muhammad, 4.0*

### **A. Pendahuluan**

Perkara politik sangatlah menarik untuk dibicarakan karena tentang politik ini berkaitan dengan kekuasaan atau *power*. Muh Kurdi Ali menyebutkan dalam bukunya bahwa politik dalam sejarah Islam adalah kebutuhan bangsa dan umat akan politik sama dengan kebutuhan manusia dengan udara dan air. Muh Ali Kurdi juga menegaskan arti tersebut dengan menyebutkan bahwasanya Umat Muslim akan mendapatkan kejayaannya kembali, maka dengan demikian itu harus melalui dan mendalami ilmu politik baik dari pengetahuan ataupun keahlian.

Singkatnya, bahwa makna penting politik bagi seluruh Muslim adalah asas kebutuhan umat Muslim untuk kembali bangkit dari keterpurukan umat Muslim dari peradaban Barat. Politik dalam pandangan Islam harus selalu digali dengan teliti, yang memungkinkannya ditemukan susunan atau bentuk dari politik Islam yang mumpuni. Menilik dari peradaban Islam, politik Islam telah dimulai dari Zaman Nabi Muhammad sebagai pemimpin Umat Muslim di era itu. Nabi Muhammad memulai era kepemimpinannya pada periode Mekkah yang kemudian dilanjutkan oleh periode Madinah untuk menjadi satu kesatuan, di mana tahap awal tersebut untuk menghasilkan masyarakat Islam. Masa peradaban sejarah Islam di zaman Nabi Muhammad ini sebagai

akar dari lahirnya politik Islam, serta kemudian akan dilanjutkan dengan perkembangan selanjutnya untuk menyempurnakan perjalanan kehidupan umat Muslim.<sup>1</sup>

Moral atau etika politik kepemimpinan Islam ataupun kepemimpinan diluar Islam sangat bergantung oleh pemimpin atau penguasanya. Semua umat pasti menghendaki sebuah pemerintahan yang berdasarkan etika serta adil, jika demikian itu maka harus banyak mengkaji kenyataan yang terjadi dengan mengangkat tinggi aksiologi keadilan, sehingga dapat terwujudnya kedamaian. Etika serta keadilan berpolitik tentunya sudah diajarkan Nabi Muhammad dalam praktiknya memimpin umat Islam pada zaman dulu, namun nyatanya yang kita dilihat di zaman sekarang umat Muslim mendapatkan berbagai macam krisis, baik itu dari segi keamanan, ekonomi dan juga krisis politik. Namun awal dari semua itu adalah diawali dari krisis moral dari penguasa bangsa, selanjutnya disusul dengan hancurnya moral para rakyat. Maka dari itu tidak perlu heran jika negara menjadi krisis. Maraknya terjadi kejahatan, dari mulai korupsi, tindak asusila, pembunuhan dan lain-lain.<sup>2</sup> Jika demikian, jauh sekali dari ajaran Rasulullah tentang berpolitik dan memimpin Negara. Maka siapakah yang menjadi panutan di zaman sekarang jika sudah tidak mencontoh Rasulullah dalam berpolitik?

## B. Metode

Berdasarkan dari permasalahan yang diajukan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Metode kualitatif merupakan suatu cara dalam meneliti dengan mendeskripsikan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>3</sup> Pendekatan ini sangat cocok untuk penelitian ini dengan tujuan memperoleh atau berusaha mendapatkan gambaran secara utuh. Data-data yang ditemukan kemudian akan dideskripsikan dalam bentuk narasi.

## C. Hasil dan Pembahasan

Moral adalah sebutan untuk menyebut manusia lain terhadap perilaku yang mempunyai *positive value*. Manusia yang tidak mempunyai moral biasa disebut dengan *amoral* yang bermakna tidak bermoral dan tidak mempunyai *positive value* di pandangan orang lain.<sup>4</sup> Secara Bahasa moral dari Bahasa latin yaitu *mos* dan jamaknya adalah *mores* yang diartikan sebagai adat - istiadat atau tata - cara. Dalam KBBI moral diartikan dengan Susila, akhlak, budi dan pekerti. Sedangkan secara istilah, ada beberapa ahli dalam mendefinisikan moral; Al-Ghazali menyebutkan pengertian akhlak, sebagai

---

<sup>1</sup> Mubasyaroh, Pola Kepemimpinan Rasulullah SAW: Cerminan Sistem Politik Islam, dalam POLITEA *Jurnal* Pemikiran Politik Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Vol. 1, No. 2, 2018, 96.

<sup>2</sup> M. Thahir Maloko, Etika Politik dalam Islam, dalam *Jurnal Al-Daulah*, UIN Alauddin Makassar, Vol. 1, No. 2, 2013, 50-51.

<sup>3</sup> Lexy J. Moeleong. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

<sup>4</sup> Wikipedia.com

persamaan kata moral, yaitu sebagai perangai atau watak yang ada didalam diri manusia dan itu asal muasal timbulnya suatu tindakan perbuatan yang akan dilakukan manusia tersebut secara ringan dan mudah tanpa ragu dan tanpa perencanaan. Kemudian Bambang Daroeso mendefinisikan moral adalah sebagai alat yang menjadikan ide tentang tingkah laku manusia, dengan mempunyai corak dasar tertentu yang dipegangi oleh kelompok manusia di dalam lingkup tertentu, serta moral adalah doktrin tentang tingkah laku hidup yang baik berlandaskan pandangan hidup atau ajaran agama tertentu.<sup>5</sup>

Sedangkan politik secara etimologi berasal dari Bahasa Yunani; *polis* yang diartikan negara atau kota.<sup>6</sup> Sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut dengan *politic* yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Sedangkan dalam Bahasa Prancis disebut dengan *Politique* yang artinya kebijaksanaan.<sup>7</sup> Jika ditilik dari segi istilah banyak sekali yang mendefinisikan pengertian politik. Yusuf Qardhawi mengatakan; politik adalah mengerjakan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan baginya.<sup>8</sup> Para Ulama terdahulu mendefinisikan politik dengan dua pengertian, yang pertama: pengertian secara umum, ialah mengendalikan perkara manusia dan perkara dunia manusia tersebut dengan syariat-syariat agama. Yang kedua: pengertian secara khusus adalah pandangan atau hukum dan ketentuan-ketentuan yang ditegaskan oleh seorang pemimpin sebagai usaha untuk menghindari kerusakan yang di prediski akan terjadi atau solusi atas suatu keadaan tertentu.<sup>9</sup> Kemudian, Deliar Noer mengemukakan pendapatnya dalam mendefinisikan politik, ada dua pendekatan; **pertama**, pendekatan yang menegaskan terhadap nilai. **Kedua**, pendekatan yang menegaskan terhadap perilaku. Pendekatan tersebut meliputi juga nilai-nilai yang sejalan dengan etika dalam menetapkan system pemerintahan baik atau buruknya seperti yang digunakan oleh pakar politik. Singkatnya, segala sikap yang berhubungan dengan segala bentuk kekuasaan atau aktivitas yang bertujuan untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah ataupun mempertahankan suatu macam bentuk tatanan masyarakat itu disebut dengan politik.<sup>10</sup>

Hakikat politik sebenarnya berpegangan kuat dengan fitrah manusia, kekuasaan, kepemimpinan dan perlindungan. Satu, politik adalah fitrah bagi manusia, bahwa sudah menjadi kebiasaan bahwasanya diantara kelompok manusia terdapat satu pemimpin yang dibanggakan serta dihormati karena keunggulannya, baik itu unggul dalam kekuatan dan

---

<sup>5</sup>Bambang Daroeso, *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila* (Semarang: Aneka Ilmu, 1986) 22.

<sup>6</sup> Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyash Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) 34.

<sup>7</sup> Muhammad Elvandi, *Inilah Politikku* (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011) 3.

<sup>8</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Legalitas Politik Dinamika Perspektif Nash dan Asy-Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2008) 53.

<sup>9</sup>Jasiman, *Rijalud Daulah: Mempersiapkan Pejabat Politik yang Merakyat* (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2012), 1.

<sup>10</sup>M. Thahir Maloko, *Etika Politik dalam Islam*, 52.

keberanian ataupun unggul dalam kecerdasan dan kebijaksanaan. Figure pemimpin seperti itulah yang diimpikan setiap rakyat serta sosok seperti itu yang akan mampu melindungi rakyatnya.<sup>11</sup> Yang kedua, politik adalah kepemimpinan. Allah telah menciptakan manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini. Dalam kacamata Islam, setiap manusia adalah seorang pemimpin. Ketiga, politik adalah perlindungan. Perlindungan yang diharapkan seluruh rakyatnya dari seorang pemimpin dari segala sesuatu yang bersifat merugikan dan keburukan. Terakhir, politik adalah kekuasaan, yang mana kekuasaan tersebut dangat tidak bisa dipisahkan dari struktur kemanusiaan dan juga politik.<sup>12</sup>

Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir yang diwahyukan Allah kepadanya Al-Qur'an. Nabi Muhammad adalah peletak dasar system kemanusiaan yang berdasarkan pada universalisme Islam. Hadirnya Nabi Muhammad menjadi pemimpin politik sangat berperan untuk menukar pertalian kesukuan atau *nasab* dengan pertalian spiritual atau *ummah*. Narasi perjuangan Nabi Muhammad dalam membangun dan memimpin agama Islam di Mekkah dan Madinah mengandung esensi etika politik yang sangat relevan serta ideal untuk diaktualisasikan dalam konteks berpolitik pada era ini. Orientasi politik yang didahulukan Nabi adalah berdasarkan pada budi pekerti atau akhlak dalam membangun komunikasi politik dengan public.<sup>13</sup>

Secara istilah politik Islam adalah pengurusan kemashlahatan umat manusia sesuai dengan *syara'*. Pandangan politik menurut *syara'*, realitanya pasti berkesinambungan dengan masalah mengatur urusan rakyat. Hanya saja setiap ideologi punya pandangan tersendiri tentang hukum dan aturan mengatur sistem politik.<sup>14</sup> Dalam segi konteks politik serta kekuasaan, Islam selalu mementingkan kesadaran kolektif bahwa puncak dari kekuasaan dan politik adalah *siyasa ilahiyah wa inabah nabawiyah* yang menunggalkan otoritas kekuasaan hanya kepada Allah. Pandangan ini sejalan dengan politik keadilan yang memberikan kekuatan kepada pemerintahan Islam dari zaman Nabi sampai sekarang.<sup>15</sup>

Sistem pemerintahan yang dibuat dan dibina oleh Nabi Muhammad berlandaskan pada konsep '*al-mujtama` al-madani*' atau masyarakat sipil yang berasaskan kepada system

---

<sup>11</sup> Jasiman, *Rijalud Daulah: Mempersiapkan Pejabat Politik yang Merakyat*, 13.

<sup>12</sup> Jasiman, *Rijalud Daulah: Mempersiapkan Pejabat Politik yang Merakyat*, 14-16.

<sup>13</sup> Suwanto dan Rahmat Hidayat, *Membumikan Etika Politik Islam Nabi Muhammad SAW Periode Madinah dalam Konteks Perpolitikan Indonesia*, dalam JUSPI (*Jurnal Sejarah Peradaban Islam*), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Vol. 3, No. 2, 2020, 125-26.

<sup>14</sup> Abdullah Zawawi, *Politik dalam Pandangan Islam*, daalm *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 5, No. 1, 2015, 88.

<sup>15</sup> Abdul Mukti Thabrani, *Tata Kelola Pemerintahan Negara Madinah Pada Masa Nabi Muhammad SAW*, dalam *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, STAIN Pamekasan, Vol. 4, No. 1, 2014, 14-15.

keIslaman<sup>16</sup> yang bermuara pada system nilai yang dikaitkan kepada tradisi *'al-hanafiyyah al-samhah'* atau tradisi Islam yang lurus dan lapang yaitu Islam yang mempunyai karakter mudah dan ringan sebagai tujuan *siyasa syar'iyah* yang melekatkan dasar-dasar politik Islam sebagai risalah yang universal. Pemerintahan Nabi mencetuskan perspektif global untuk menumbuhkan pemahaman di kalangan elite serta para rakyat dalam bentuk perbuatan bersama yang dilandasi dengan mufakat yang mempertimbangkan aspek moral dan prinsip-prinsip hidup yang bermartabat dan mulia. Pembangunan asas-asas politik pemerintahan Nabawi ini menyediakan ruang yang luas bagi transformasi peradaban yang berlandaskan pemikiran dan juga ilmu pengetahuan.<sup>17</sup>

Dilihat dari sejarah bahwasanya Nabi Muhammad mulai berpolitik di kota Makkah dengan para sahabat beliau untuk mengumpulkan semangat juang dakwah. Bahkan pada saat Nabi di Makkah Nabi masih melakukan hubungan dengan para sahabat di Yatsrib. Pada saat itu ada 6 orang yang telah masuk Islam. Setelah Nabi berdakwah di Makkah beliau berhijrah ke Madinah. Perjuangan politik Islam pada saat itu ditandai dengan setelah berlangsungnya peristiwa bai'at aqobah. Hal ini adalah suatu pencapaian yang gemilang dengan melihat bahwasanya Islam yang dulu masih dipenuhi dengan kekufuran. Nabi Muhammad memang sangat cerdas dalam berpolitik, ini terbukti dalam pemilihan beliau mencari tempat Hijrah, yaitu Madinah. Para kaum Quraisy pada saat itu semakin geram karena mereka tahu bahwasanya kota Madinah adalah tempat yang sangat strategis untuk berdagang. Dan karena sebab itu penjuru dunia akan pergi ke Madinah untuk berdagang serta masyarakat Madinah pun pergi ke luar untuk membawa barang dagangan.<sup>18</sup>

Dalam rencana Rasulullah membangun politik di Madinah, Rasulullah memulai dengan mempersaudarakan masyarakat Madinah yang multicultural; yaitu kaum Muhajirin dan Kaum Anshar. Rasulullah menciptakan rasa persaudaraan yang tinggi untuk mengganti asas sosial penduduk Madinah yang sangat fanatic dengan kesukuan. Hubungan persaudaraan yang berlandaskan Islam tidak diartikan hanya dengan persaudaraan antar sesama Muslim. Namun juga persaudaraan yang mencakup segala lingkup masyarakat yang menyatakan janji setia kepada Rasulullah sebagai pemimpin. Puncak kesuksesan Nabi Muhammad dalam berpolitik adalah dengan perdamaian yang terjadi pada tahun 690 Masehi. Sesudah dengan pembebasan kota Makkah dan perang Tabuk. Sikap bijaksana Nabi Muhammad menjadi pemimpin politik di Madinah menciptakan kekuatan yang sangat kuat untuk menarik perhatian bangsa Arab untuk

---

<sup>16</sup>Syed Farid Alatas, Islam, Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan dan Masyarakat Sipil, Universiti Kebangsaan Singapura dalam Makalah tidak diterbitkan Jabatan Sosiologi [socsf@nus.edu.sg](mailto:socsf@nus.edu.sg), 7.

<sup>17</sup>Ibid, 15.

<sup>18</sup>Sukron Amin, Identitas Politik Islam Masa Nabi Muhammad dan Khulafa Al-Rasyidin (*skripsi tidak diterbitkan*: Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017) 30-31.

datang ke Madinah hanya agar dapat memeluk agama Islam, itu semua dikarenakan Islam akan selalu melindungi umatnya dengan panji-panji Islam yang berlandaskan persamaan dan keadilan.<sup>19</sup>

Di era 4.0 yang biasa disebut dengan revolusi industry ini tentu saja menjadi tantangan yang berat untuk berpolitik dengan mengamalkan praktik Rasulullah. Sebelumnya perlu diketahui bagaimana industry 4.0 ini bekerja. Pada era ini revolusi industry mengubah cara kerja institusi dan organisasi public beroperasi. Dari sini tatanan pemerintah local, nasional maupun internasional dituntut untuk beradaptasi membentuk ulang tatanan dengan menemukan cara-cara baru untuk berkolaborasi dengan masyarakat dan sector private. Revolusi 4.0 ini juga mempengaruhi hubungan antar pemerintahan dan antar negara. Revolusi industry ini mengubah tanggapan tradisional atas politisi dan lakon mereka di masyarakat.<sup>20</sup>

Pembaharuan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, maka di revolusi industry yang semuanya telah berubah dari mulai bioteknologi, digital, kecerdasan buatan dan lainnya. inovasi-inovasi tersebut telah mendefinisikan ulang arti manusia. Inovasi-inovasi tersebut juga menjadikan suatu batasan-batasan kita tentang kesehatan, dan usia hidup serta kemampuan lainnya yang sebelumnya hanya ada di genre fiksi ilmiah.

Seiring dengan berkembangnya penemuan dan pengetahuan dibidang tersebut, perihal etika dan moral sangatlah penting. Manusia sebagai makhluk sosial akan berpikir mengenai bagaimana merespon persoalan yang terjadi akibat revolusi industry ini. Penemuan-penemuan yang menakjubkan dapat dimanipulasi untuk berbagai kepentingan tertentu. Dampaknya dari teknologi digital yang sangat canggih di era ini membangkitkan jiwa-jiwa kecurangan manusia untuk memanipulasi dan menjalankan triknya dalam perihal politik, pencucian uang dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

Tegasnya, dengan adanya revolusi industry 4.0 yang telah mengubah semua system dan paradigma manusia di muka bumi menjadikan tujuan politik yang sebenar-benarnya menjadi hilang kendali. Yang awalnya tujuan politik yang diajarkan Rasulullah adalah untuk membangun dan membina system pemerintahan dan negara yang tegak dan sejalan dengan hukum syariat Islam, memelihara dan melaksanakan proses pengadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip umat Islam, serta menjaga dan mengendalikan hal ihwal demi melindungi negara. Politik adalah pemikiran yang berupa tuntutan, keyakinan hukum dan informasi. Prinsip politik yang dicontohkan Rasulullah ialah menjunjung tinggi nilai musyawarah, menjalankan amanah, menetapkan hukum secara tepat dan adil.

---

<sup>19</sup>Suwanto dan Rahmat Hidayat, 130-131.

<sup>20</sup>Klaus Schwab, *Revolusi Industri Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019) 85.

<sup>21</sup>Klaus Schwab, 128-129.

Menepati janji dan tidak berbohong demi untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.<sup>22</sup>

Berpolitik di era 4.0 ini sudah dapat kita pantau bahwa terjadi jarak pemisah antara negara dan agama. Para petinggi liberal menuntut para Ulama untuk merampungkan masalah keagamaan dan keulamaan dan menyerahkan kepengurusan tentang kenegaraan kepada para politisi. Menjalankan negara Syari'at tidak diperbolehkan karena itu dapat menarik para masyarakat Islam di seluruh penjuru negeri akan menjadi negara yang totaliter. Para petinggi liberal beranggapan bahwa apa yang sesuai dengan Rasulullah pada tempo dulu belum tentu benar di zaman sekarang ini. Padahal pada kenyataannya al-Qur'an serta sunnah telah membahas tingkatan tentang budaya serta pemerintahan yang tinggi dan gemilang untuk seluruh cakupan umat Muslim. Ada beberapa negara dengan penduduk yang mayoritas Muslim mengusulkan untuk mengubah system pemerintahan negara dengan model Madinah. beberapa meyakini bahwa pemerintahan model Madinah dan al-Quran dapan memberikan kesejahteraan dan kemajuan bagi umat dan bangsa.<sup>23</sup>

Zaman sekarang yang serba canggih ini menjadikan kita lupa siapa sebenarnya panutan sesungguhnya. Nabi Muhammad telah mengajarkan bagaimana berperilaku, bagaimana beretika dalam berpolitik. Namun pada kenyataannya tidak banyak mungkin hampir tidak ada yang menerapkan gaya atau style berpolitik Rasulullah. Kemajuan revolusi industry membuat para pemanggu pemerintahan terlena dalam menjalankan politik saat ini. Pemicu dari ini semua bisa jadi dari 'gila jabatan' atau '*addicted respect*' atau biasa disebut gila hormat.

Pada masa Rasulullah menjadi pemimpin, Rasulullah sadar betul bahwa posisi beliau menjadi kepala negara harus bertindak tegas, maka dari itu Rasulullah sering melakukan kesepakatan bersama. Rasulullah bermusyawarah Bersama dengan rakyat untuk membentuk tatanan pemerintahan yang tida membedakan agama, golongan, ras dan suku agar terciptanya keadilan. Rasulullah mencetuskan piagam Madinah dengan asas-asas yang telah disepakati bersama, yaitu; pertama, semua masyarakat Muslim, menjadi satu komunitas walaupun dari berbagai suku yang berbeda. Kedua, masyarakat Muslim dengan masyarakat Muslim yang lain dan Masyarakat Muslim dengan non Muslim tetap berhubungan dengan prinsip-prinsip yang disepakati, diantaranya; (1) saling menghormati dan baik dalam bertetangga. (2) saling menolong dan membantu untuk menghadapi para musuh. (3) membela dan mendukung untuk mereka yang sedang teraniaya dan terancam. (4) saling memberi nasehat. (5) saling toleransi dan menghormati agama lain.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Abdullah Zawawi, Politik dalam Pandangan Islam, dalam *Jurnal Ummul Qura*, Vol. V, No. 1, 2015, 98-99.

<sup>23</sup>Yunus Rahawarin, Membaca Pemikiran Arkoun Tentang Etika Politik Islam, dalam *Jurnal Al-Fikr*, Vol 20, No. 1, 2016, Universitas Pattimura Ambon, 93.

<sup>24</sup>Nurrohman, Politik Islam dalam Cita dan Realita, Dalam *Jurnal al-Qubra*, Vol. 1, No. 1, 2011, 17.

Kita dapati di era sekarang, hampir semua negara menerapkan pemerintahan yang berbasis demokratis. Ada beberapa negara yang juga mempraktekkan demokrasi ini yang ujung-ujungnya menjadi anarkis. Khalid Muhammad menerangkan di dalam bukunya yang berjudul *Agama Meluruskan Bangsa* bahwa kesesuaian antara Demokrasi dan Agama Islam adalah mengemukakan bahwasanya hak-hak makhluk adalah hak-haknya Allah Swt. Wujud langsung dari pemeliharaan hak-hak Allah adalah berkesinambungan dengan penghormatan serta penghargaan kepada sesama umat manusia. Agama Islam juga sangat menentang akan adanya feodalisme. Namun nyatanya yang kita temui di negara yang sangat demokratis ini banyak terjadi feodalisme dan bahkan para petinggi pun ikut membela. Sebenarnya para feodalisme tersebut tidak pantas ditoleransi dan dihargai karena mereka pun tidak menghargai orang lain. Bagaimana bisa para pemimpin membiarkan mereka menguasai hasil bumi, seperti tanah, batu bara, gas bumi dan lain-lain. Sedangkan masyarakat yang telah bekerja untuk itu semua tidak mendapat apa-apa dari jerih payahnya. Ini semua adalah sebab pemimpin yang tidak mengedepankan etika dan moral, sehingga dia bermain politik dengan tidak benar dan menjadikan bangku politik sebagai taman kebahagiaan bagi diri sendiri dan golongannya.<sup>25</sup>

Sebenarnya pemerintahan bersistem demokratis ini adalah dambaan setiap bangsa negara. Karena masyarakat bukan barang yang dapat diperjual belikan, atau harta yang dapat diwariskan turun temurun atau juga sapi yang diperah susunya. Semua manusia yang terlahir ke bumi adalah manusia-manusia merdeka yang dapat memilih tujuan hidupnya. Selama masyarakat masih membutuhkan figure pemimpin yang mengatur segala kebutuhan mereka, maka pemimpin itu harusnya terlahir dari rakyat. Yang harus betul-betul bisa memberikan rasa damai dan aman, dapat bekerjasama serta bertanggung jawab dan tulus mengabdikan diri kepada agama dan negara maka dengan itu negara demokratis akan tercipta dengan baik. Walaupun di zaman Rasulullah tidak ada system demokratis ini namun dalam praktiknya Rasulullah sudah mewujudkan dalam bentuk musyawarah, keadilan bagi seluruh masyarakat, menghargai HAM dan Rasulullah sangat bertanggung jawab terhadap kepentingan umat.<sup>26</sup>

Rasulullah dalam berpolitik dan menjadi pemimpin berprinsip dan menerapkan konsultasi dengan masyarakat. Walaupun Nabi Muhammad sebagai Rasul namun dalam menetapkan sebuah keputusan beliau selalu menanyakan pendapat rakyat. Rasulullah juga sangat lapang dalam menerima kritik dan saran dari sahabat serta kerabatnya. Bahkan beliau terkadang membatalkan atau menarik pendapat beliau pribadi. Rasulullah selalu menanamkan dan mengajarkan para sahabat beliau agar bersikap adil dalam menerapkan keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban masyarakat. HAM juga ditonjolkan Rasulullah dalam memimpin, agar terciptanya kebebasan dalam beragama, kemerdekaan dalam berbicara, dan kebebasan dalam mencari rezeki dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>M. Basir Syam, *Kebijakan dan Prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad Saw Di Madinah (622-632 M)* (Tinjauan Perspektif Pemikiran Politik Islam), dalam *KRITIS Jurnal Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol. 1, No. 1, 2015, 160.

<sup>26</sup>Ibid, 161.

<sup>27</sup>Ibid, 172.



Ada beberapa prinsip yang sudah diajarkan Rasulullah dalam berpolitik, yang mana ajaran ini sudah disebutkan di dalam al-Quran dan Sunnah, diantaranya; penyalahgunaan kekuasaan, kekuasaan itu adalah amanah, mengakui dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, selalu bermusyawarah dan mendengarkan pendapat dari rakyat, dan lain-lain. Jika prinsip-prinsip yang diajarkan Rasulullah tersebut tidak dijalankan dengan benar, maka akan menimbulkan moral serta etika pemimpin buruk. Menjadikan pemimpin yang suka korupsi karena terlalu berambisi akan mendapatkan harta dan uang yang berlimpah. Kemudian, moral dan etika pemimpin yang buruk akan menjadikan pemahaman agamanya sebagai pengendali dalam melakukan suatu perbuatan dan Tindakan. Jika lemah pemahaman agamanya maka pemimpin Ketika berpolitik tidak akan memperhatikan nilai-nilai moral serta etika. Kemudian, jika pemimpin tidak bermoral maka rasa tanggung jawab pada dirinya tidak ada. Berkuasa bukanlah memegang setir politik sambil menindas rakyat, namun harus bertanggung jawab kepada agama, rakyat, negara, serta bangsa.<sup>28</sup>

Al-Quran adalah sumber panutan moral berpolitik. al-Quran menjadi konsep etika, dimana etika tersebut menuntun agar hidup dengan baik. Al-Qur'an mengajarkan bagaimana seorang pemimpin yang harus bersikap lemah lembut serta tidak menyakiti hati orang lain baik itu dari perkataan atau tindakan. Al-Qur'an menegaskan juga bahwa seorang pemimpin harus memberikan rasa ketentraman dan mengajak para rakyat untuk melakukan musyawarah dalam setiap rencana. Agama adalah system nilai yang memang diyakini keabsahannya. Rasulullah sudah menjelaskan juga bahwa al-Qur'an adalah sumber gagasan politik yang baik, pemimpin yang baik tercipta dari nilai luhur agama. Singkatnya selama pemimpin menjalankan politik sesuai dengan ajaran al-Quran dan sunnah maka pemimpin tersebut akan bertindak sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad dan negara akan menjadi damai tentram sesuai dengan kehendak umat semua.<sup>29</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Membumikan moral berpolitik Rasulullah adalah menerapkan segala ajaran dan tata cara yang sudah diajarkan Nabi Muhammad dalam praktik beliau menjadi pemimpin pada tempo dulu. Pengertian moral itu sendiri adalah: akhlak atau budi pekerti. Sedangkan pengertian politik itu sendiri adalah: mengatur urusan manusia, negara atau bangsa.

Kenyataannya yang kita lihat sekarang pada revolusi industry 4.0 ini banyak sekali pemimpin yang tidak menjalankan politik yang sehat. Rata-rata pemimpin sekarang menjadi gila jabatan dan ambisi mengejar harta sehingga hanya berpangku tangan menikmati sumber daya alam dan mengabaikan kepentingan rakyat. Semua yang dicontohkan Rasulullah

---

<sup>28</sup>M. Thahir Maloko, *Etika Politik dalam Islam*, 55.

<sup>29</sup>Ibid, 56-57.

dianggap tidak relevan dengan zaman sekarang yang sebenarnya sudah kita ketahui bahwa nilai-nilai al-Qur'an yang tinggi selalu dapat diterapkan disepanjang kehidupan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mubasyaroh, Pola Kepemimpinan Rasulullah SAW: Cerminan Sistem Politik Islam, dalam *POLITEA Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Maloko, M. Thahir. Etika Politik dalam Islam, dalam *Jurnal Al-Daulah*, UIN Alauddin Makassar, Vol. 1, No. 2, 2013.
- Daroeso, Bambang. *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila*, Semarang: Aneka Ilmu, 1986.
- Salim, Abdul Muin. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Elvandi, Muhammad. *Inilah Politikku*, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Qardhawi, Yusuf al. *Legalitas Politik Dinamika Perspektif Nash dan Asy-Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Jasiman, *Rijalud Daulah: Mempersiapkan Pejabat Politik yang Merakyat*, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2012.
- Suwanto dan Rahmat Hidayat, Membumikan Etika Politik Islam Nabi Muhammad SAW Periode Madinah dalam Konteks Perpolitikan Indonesia, dalam *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Zawawi, Abdullah. Politik dalam Pandangan Islam, dalam *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 5, No. 1, 2015.
- Thabrani, Abdul Mukti. Tata Kelola Pemerintahan Negara Madinah Pada Masa Nabi Muhammad SAW, dalam *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, STAIN Pamekasan, Vol. 4, No. 1, 2014.
- Alatas, Syed Farid. Islam dan Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan dan Masyarakat Sipil, Universiti Kebangsaan Singapura dalam Makalah tidak diterbitkan Jabatan Sosiologi [socsfa@nus.edu.sg](mailto:socsfa@nus.edu.sg).
- Amin, Sukron. Identitas Politik Islam Masa Nabi Muhammad dan Khulafa Al-Rasyidin, *skripsi tidak diterbitkan*: Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Schwab, Klaus. *Revolusi Industri Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Zawawi, Politik dalam Pandangan Islam, dalam *Jurnal Ummul Qura*, Vol. V, No. 1, 2015.
- Rahawarin, Yunus. Membaca Pemikiran Arkoun Tentang Etika Politik Islam, dalam *Jurnal Al-Fikr*, Vol 20, No. 1, 2016, Universitas Pattimura Ambon.
- Nurrohman, Politik Islam dalam Cita dan Realita, dalam *Jurnal al-Qubra*, Vol. 1, No. 1, 2011.
- Syam, M. Basir. Kebijakan dan Prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad Saw Di Madinah (622-632 M) (Tinjauan Perspektif Pemikiran Politik Islam), dalam *KRITIS Jurnal Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol. 1, No. 1, 2015.